

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini menyebabkan berbagai macam perubahan yang terjadi pada setiap lini kehidupan masyarakat. Perubahan ini berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang disebut reformasi birokrasi. Dengan adanya reformasi birokrasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan pada masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan perbaikan dengan melakukan perubahan tatanan organisasi. Hal ini yang menyebabkan perubahan terhadap struktur organisasi yang disebut restrukturisasi organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat.

Adanya restrukturisasi tersebut menyebabkan terjadinya beberapa hal yang harus ikut berubah atau menyesuaikan. Dalam hal ini terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk yang diakibatkan dari adanya penggabungan ataupun pembubaran organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan. Restrukturisasi organisasi di lingkungan pemerintah berdampak

pada pengelolaan instansi pemerintah, yang mana hal ini berpengaruh pada arsip yang dihasilkan oleh instansi yang bersangkutan.

Arsip merupakan bagian penting dari suatu instansi. Arsip yang dihasilkan oleh instansi pemerintah dapat memuat informasi penting instansi terkait yang terekam dalam berbagai media seperti media tulis, gambar, maupun elektronik yang dikeluarkan oleh instansi tersebut untuk digunakan dan selanjutnya dapat disimpan dan dirawat dengan baik agar dapat digunakan kembali jika diperlukan. Selain itu arsip dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang memiliki informasi valid. Untuk menjaga agar isi informasi dan fisik arsip diperlukan adanya proses penyelamatan arsip sebagai langkah sebagai langkah untuk menyelamatkan arsip.

Penyelamatan arsip merupakan pengambilalihan arsip secara sistematis dari setiap instansi yang berada di lingkungan pemerintah oleh lembaga kearsipan. Hal ini berfungsi untuk menjaga informasi yang terkandung di dalam arsip, serta menjaga bentuk fisik arsip. Oleh karena itu pemerintah melakukan penyelamatan arsip ketika terjadi perubahan struktur instansi pemerintahan dalam bentuk penggabungan maupun pembubaran.

Untuk melakukan restrukturisasi organisasi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut dari adanya peraturan tersebut pemerintah daerah Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, terdapat beberapa OPD yang dikurangi atau ditambah fungsinya, dan ada beberapa OPD baru yang

merupakan gabungan dari beberapa fungsi dari OPD lama. Peraturan daerah ini menjelaskan bahwa dijelaskan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 23 dinas, 1 inspektorat, dan 4 badan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 dijelaskan bahwa jika terjadi penggabungan atau pembubaran suatu satuan kerja perangkat daerah maka, dilakukan penyelamatan arsip statis yang memiliki nilai guna oleh lembaga kearsipan, baik ditingkat pusat maupun daerah (Republik Indonesia, 2009, p. 24). Terkait hal tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga kearsipan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban, untuk menyelamatkan arsip-arsip milik OPD yang digabung dan atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelamatan arsip dilakukan dengan melakukan penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip dan diakuisisi oleh lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan berkewajiban melakukan akuisisi arsip dari lembaga terkait, seperti lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan termasuk lembaga swasta yang memperoleh anggaran negara atau bantuan luar negeri. Akuisisi arsip statis merupakan kegiatan pemantauan keberadaan arsip yang memiliki potensi arsip statis (Muliani & Rahmah, 2018, p. 349).

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap organisasi perangkat daerah sudah seharusnya memiliki unit kearsipan. Adapun dalam unit ini arsip dikelola dengan baik dan benar oleh pencipta arsip, hingga waktunya arsip-arsip tersebut dipindahkan ke lembaga kearsipan. Hal ini dilakukan agar organisasi perangkat

daerah dapat menyelenggarakan sistem kearsipan yang baik dan benar, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, kearsipan memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun kearsipan masih belum menjadi prioritas bagi lembaga-lembaga, dalam hal ini terkait kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Sehingga, masih banyak pengelolaan arsip pada satuan kerja perangkat daerah yang belum sesuai dengan kaidah kearsipan (Permana, 2016). Hal ini tentunya berakibat belum berjalannya tata kelola arsip yang sesuai dengan prosedurnya. Sehingga hal tersebut berakibat pada terjadinya permasalahan di lembaga kearsipan daerah, sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kearsipan. Pengelolaan arsip yang belum berjalan sesuai dengan prosedurnya, dapat menjadikan lembaga kearsipan harus bekerja lebih keras untuk memastikan arsip yang memiliki nilai guna. Agar arsip tersebut dapat diselamatkan isi informasi yang terkandung, sekaligus menjaga dan merawat bentuk fisiknya.

Isi informasi yang dimuat oleh arsip memiliki nilainya masing-masing. Maka sebagai lembaga kearsipan daerah yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan arsip sudah seharusnya melakukan penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna bagi pemerintah daerah. Arsip diselamatkan pasca penggabungan organisasi perangkat daerah ialah arsip inaktif dan arsip statis. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga memiliki kewajiban dalam menjaga dan

melestarikan arsip pada organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal terkait penyelamatan arsip yang terjadi pasca penggabungan maupun pembubaran instansi pada pemerintah daerah, menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam. Adapun hal ini penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait proses penyelamatan arsip, yang mana arsip mengandung nilai guna yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu instansi. Selain itu Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelopor provinsi yang melakukan penggabungan maupun pembubaran instansi. Akan tetapi, penelitian terkait proses penyelamatan arsip yang ada di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah belum dilakukan kajian sebelumnya. Sehingga penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait proses penyelamatan arsip yang ada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, kajian dalam penelitian ini memiliki judul “Penyelamatan Arsip Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Penggabungan Instansi Pemerintah Jawa Tengah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana kondisi arsip organisasi perangkat daerah pasca penggabungan instansi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan upaya penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi arsip organisasi perangkat daerah pasca penggabungan instansi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan upaya penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian dan memberi kontribusi baru secara ilmiah dalam kajian ilmu kearsipan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelamatan arsip.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 201 Sronдол Kulon, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan bulan.

1.6 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan dikaji proses penyelamatan arsip Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah pasca penggabungan instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah merupakan lembaga pemerintah pada tingkat provinsi, yang bergerak pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satu fungsi dari lembaga kearsipan ialah melaksanakan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, serta layanan dan pemanfaatan arsip. Adanya penggabungan atau pembubaran instansi daerah akan berpengaruh pada pengelolaan arsip di instansi tersebut. Arsip statis dari instansi diakuisisi oleh lembaga kearsipan daerah agar isi informasi dapat diselamatkan. Arsip-arsip dari lembaga terkait jika dibiarkan akan kehilangan isi informasinya dan tidak dapat dikelola oleh lembaga pencipta. Proses pengelolaan arsip statis berpengaruh pada penyelamatan isi informasi arsip.

1.7 Batasan Istilah

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Arsip Vital

Arsip vital adalah arsip yang dihasilkan oleh instansi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang berisi tentang informasi penting tentang keberadaan dan kegiatan suatu instansi yang mengandung informasi mengenai status hukum, hak, dan kewajiban serta aset instansi.

2. Arsip Statis

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh instansi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah habis masa retensinya, tetapi memiliki nilai

guna kesejarahan dan memiliki keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi oleh lembaga kearsipan.

3. Lembaga Kearsipan Daerah

Lembaga kearsipan daerah adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan pada masing-masing daerah. Dalam hal ini yang dimaksud lembaga kearsipan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi organisasi adalah proses penataan ulang organisasi birokrasi untuk mencapai tujuan organisasi.

5. Penyelamatan Arsip

Penyelamatan arsip adalah pengambilalihan arsip secara sistematis dari setiap instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga isi informasi dan bentuk fisik arsip.

6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab pada Gubernur Jawa Tengah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.